

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai bentuk awal dalam mengkaji penulisan skripsi, di bab awal ini penulis akan menjelaskan beberapa informasi mendasar yang dapat membantu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini nantinya. Dimulai dari pengertian latar belakang masalahnya yaitu penghambatan komoditas kelapa sawit Indonesia dari pihak Entitas Internasional, yang kemudian rumusan masalah telah dirumuskan untuk dapat dijawab dalam skripsi ini. Yang mana perlu adanya kerangka pemikiran sebagai dasar utama, serta hipotesa awal untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Maka penulisan bab ini akan diakhiri penjelasan yang terkait dengan tujuan penelitian, batasan penelitian, hingga metode penelitian yang digunakan untuk penyelesaian skripsi ini.

A. Latar Belakang Masalah

Berawal dari perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi bahkan melalui sesama pengusaha antar negara. Hal tersebut merupakan perdagangan yang diperankan untuk tercapainya peredaran dagang secara menyeluruh maupun mendunia antar negara. Tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri dalam sektor barang maupun jasa, maka oleh karna itu hal tersebut yang melatar belakangi terjadinya perdagangan secara internasional. Maka sangat penting adanya perdagangan internasional atas dasar saling membutuhkan dan menuntungkan kedua belah pihak dan memiliki manfaat antar negara sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat negara satu dengan negara lainnya. Dan juga bagi negara yang memerlukan barang maupu jasa sudah pasti terbantu dalam memenuhi kebutuhannya maupun sebaliknya bagi negara yang menawarkan barang maupun

jasa juga akan mendapatkan keuntungan secara finansial dari negara yang membutuhkan barang maupun jasa mereka. (Rinaldi, 2018)

Minyak nabati merupakan salah satu komoditas perdagangan yang penting dan banyak diperdagangkan secara internasional. Minyak nabati yang diproduksi di Indonesia adalah minyak kelapa sawit, yang merupakan komoditas penting bagi prekonomian Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui, Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Minyak kelapa sawit menjadi komoditas unggulan ekonomi nasional dan dapat menyumbang devisa sebanyak USD 20,54 miliar pada tahun 2018 serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi 17 juta manusia. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang dapat menghasilkan minyak makan, minyak industri maupun bahan bakar nabati (*biodiesel*). Kelapa sawit memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sejak tahun 2000 industri kelapa sawit telah membebaskan 10 juta manusia dari kemiskinan dan merupakan aspek penting bagi negara untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. (Gartina, 2019)

Minyak nabati merupakan jenis minyak yang dihasilkan dari tanaman-tanaman penghasil lemak alami melalui proses ekstraksi yang berasal dari berbagai jenis biji-bijian dan buah seperti kedelai, kelapa, zaitun, biji bunga matahari, biji kapas dan termasuk kelapa sawit. Minyak nabati digunakan hampir diseluruh produk pangan dan merupakan komponen penting bagi bidang perindustrian; mulai dari sabun, lilin, kosmetik, produk perawatan kulit maupun kayu sampai insulator listrik. Dan juga minyak nabati juga digunakan sebagai bahan dasar *biofuel* untuk menggantikan minyak bumi karna sifatnya

yang dapat diperbarui, ramah lingkungan dan mudah terurai oleh alam. (Kemlu, 2019)

Sejak zaman dahulu manusia telah menggunakan minyak nabati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia telah memproduksi minyak nabati sejak 8000 tahun yang lalu. Pengembangan pengetahuan dalam memproduksi minyak nabati dalam skala industri dimulai sejak akhir 1800-an, yang mana teknologi hidrogenasi dalam ekstraksi minyak nabati dikembangkan dan mampu memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Pada era modern saat ini yang diikuti dari perkembangan teknologi para ilmuwan telah menemukan bahwa mengkonsumsi lemak baik itu dalam bentuk minyak nabati maupun hewani sangat baik menjaga kesehatan karna mengandung zat gizi mikro atau mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah sedikit, namun mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim serta mengatur fungsi sistem imun dan sistem reproduksi. (Schuster, 2014)

Di Indonesia sendiri, minyak kelapa sawit merupakan produk minyak nabati yang penting dan yang paling utama. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas minyak nabati yang paling banyak diperdagangkan dan digunakan di dunia. Minyak ini digunakan dalam berbagai produk makanan, kosmetik, hingga biofuel. Sekitar 50% produk makanan dalam kemasan saat ini memiliki kandungan minyak sawit. Selain itu, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perdagangan internasional utama bagi Indonesia. Ditambah lagi, Indonesia juga merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah produksi minyak kelapa sawit Indonesia cenderung

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Table 1.1 berikut menunjukkan tren peningkatan produksi minyak kelapa sawit Indonesia dari 2013 sampai 2017.

Table 1.1: Tren peningkatan produksi & ekspor minyak kelapa sawit Indonesia

No.	Tahun	Total produksi Minyak sawit (ton)	Volume Ekspor (ton)	Volume Ekspor terhadap Produksi Sawit (%)	Nilai Ekspor (USD)
1	2013	33.338.405	22.222.508	67%	17.140.435
2	2014	35.133.827	24.372.011	69%	19.005.312
3	2015	37.284.018	28.276.871	76%	16.943.095
4	2016	38.077.153	24.336.303	69%	16.275.696
5	2017	45.558.269	29.135.179	79%	20.802.708

Sumber: www.worldbank.com, diolah oleh BPPK, Kemlu.

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada tahun 2013-2015, volume ekspor total minyak kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 2% hingga 7%. Namun, pada tahun 2016 volume ekspor menurun sebesar 12%. Dan pada tahun 2017, volume ekspor kembali mengalami peningkatan sebesar 9% menjadi 29,07 juta ton dengan nilai sebesar USD 20.802.708. Sebagian besar minyak kelapa sawit yang diproduksi di Indonesia diekspor ke luar negeri. Pada tahun 2017 data menyebutkan bahwa, negara-negara pengimpor minyak kelapa sawit Indonesia utamanya adalah India, Belanda, Singapura, Italia, dan Spanyol. (BPS, 2017)

Nilai yang dihasilkan dari hasil minyak kelapa sawit bagi negara Indonesia sangatlah penting, dikarenakan merupakan penyumbang utama dari devisa nonmigas, yang mana sektor tersebut dapat menyerap hingga 6.000 pekerja baru setiap tahunnya. Dan juga sekitar 2,3 juta petani kecil dan dapat memperkerjakan 4,6 juta tenaga kerja baik itu secara langsung maupun industri-industri turunannya seperti industri pangan dan kosmetik. Selain nilai yang dihasilkan dari produk minyak nabati khususnya minyak kelapa sawit yang positif bagi kesejahteraan masyarakat, minyak nabati juga memiliki nilai jual yang begitu menggiurkan dan sebagai salah satu industri komoditas yang berpengaruh besar terhadap pembangunan dan perkembangan ekonomi suatu negara penghasil minyak nabati salah satunya seperti negara Indonesia. (Kemlu, 2019)

Prospek perkembangan industri kelapa sawit saat ini sangat berkembang pesat yang mana terjadi peningkatan baik itu luas area perkebunan sawit maupun jumlah produksinya dan juga tenaga kerja yang diserap, seiring dengan diikutinya oleh perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 kelapa sawit di Indonesia sendiri memiliki luas lahan sekitar 14.677.560 juta hektar yang mana dari luas lahan tersebut sekitar 8.085.134 juta hektar atau 55 persen merupakan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan besar swasta (PBS) sementara itu perkebunan rakyat (PR) memiliki luas lahan 5.958.502 juta hektar atau 40 persen sedangkan Sebagian kecil diusahakan oleh perkebunan besar negara (PBN) yang memiliki lahan sebesar 633.924 ribu hektar atau 4 persen dari total keseluruhan wilayah perkebunan Indonesia. (Gartina, 2019)

Namun disisi lain tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi untuk mendorong produksi minyak nabati agar

tetap setabil dan seimbang terhadap ekosistem yang berkelanjutan. Salah satu tantangannya ialah masalah terhadap lingkungan hidup. Yang mana banyak sekali hutan yang dibakar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi hanya untuk membuka lahan perkebunan penghasil minyak nabati, salah satunya ialah perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan terjadinya kegundulan hutan, kebakaran hutan yang sangat luas dan juga hilangnya tempat tinggal atau terbunuhnya satwa-satwa yang berada di hutan tersebut. Selain itu perkebunan kelapa sawit juga dapat merubah komposisi keanekaragaman hayati di hutan dan mengubah tingkat serapan air tanah. Hal tersebut mengakibatkan kekhawatiran akan dampak yang terjadi nantinya jika pengelolaan yang tidak tepat tersebut dibiarkan begitu saja. Maka dari itu negara-negara penghasil minyak nabati terus berusaha membuat kebijakan dan melakukan pengawasan sebaik-baik mungkin demi terwujudnya kesetabilan dalam memproduksi dan menjaga keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan.

Maka masalah tersebut dapat menyebabkan penghambatan dari sisi perdagangan minyak sawit yang berakibat terpengaruhnya ekspor Indonesia yang dilakukan oleh sejumlah entitas internasional yang juga dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan, dan pada saat ini produk minyak kelapa sawit Indonesia tengah menghadapi berbagai hambatan, khususnya terkait dengan akses pasar, baik hambatan tarif maupun non tarif seperti standarisasi dan juga ditambah lagi dengan munculnya berbagai kampanye negative tentang kelapa sawit. Apabila hal ini tidak ditangani dengan baik, tentunya dapat berdampak terhadap penurunan drastis ekspor kelapa sawit dan khususnya akan mempengaruhi secara negatif bagi kesejahteraan masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari keberadaan industri sawit,

khususnya bagi masyarakat di daerah-daerah penghasil Sawit. (Kemlu, 2020)

Dalam rangka melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia dan juga sebagai jawaban dari berbagai tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim global. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini membentuk agenda sebagai aksi global yang dinamakan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 17 tujuan.

Dengan adanya beberapa hambatan perdagangan terkait perindustrian minyak kelapa sawit Indonesia, maka akan ada beberapa tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan sulit tercapai di Indonesia, seperti mengenai kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus dapat menangani masalah yang terjadi di dalam perindustrian minyak kelapa sawitnya, agar nantinya dapat mewujudkan atau menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam menyukseskan *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Maka hal utama dalam bidang pengolahan industri kelapa sawit Indonesia akan mendukung dan juga berpartisipasi mengenai: pengembangan masyarakat (*people*), pertumbuhan ekonomi (*profit*), dan perlindungan terhadap lingkungan (*planet*). Merujuk pada prinsip-prinsip berkelanjutan TPB dan *three spheres of sustainability* (*social, economic, dan environmental*) atau trifungsi kelestarian. Dalam hal ini, pembangunan dan pengolahan dalam bidang industri kelapa sawit harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku demi menyeimbangkan

memenuhi ketiga aspek ini, yaitu kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan tidak merusak lingkungan. Dari penggabungan tri-kelestarian dan prinsip-prinsip TPB tersebut, maka dapat di garis bawahi bahwa pengelolaan industri sawit berkelanjutan dapat ditinjau dari 3 aspek utama, yaitu:

1. Aspek *people*, mengutamakan bahwa industri sawit secara sosial harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
2. Aspek *profit*, mengutamakan bahwa industri sawit harus menguntungkan secara ekonomi;
3. Aspek *planet*, mengutamakan bahwa industri sawit secara ekologi tidak merusak lingkungan. (Kemlu, 2019)

Dari tahun 2011 pemerintah Indonesia telah menerapkan tata kelola dan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan demi mendorong *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan tri-kelestarian yakni dibentuknya *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang merupakan sistem penetapan dan juga pengawasan produk maupun cara pengolahan lahan kelapa sawit yang digagas dari pemerintah Indonesia yang dikembangkan sebagai bentuk tata kelola industri minyak kelapa sawit agar nantinya berjalan sesuai dengan aturan sehingga tercapainya *Sustainable Development Goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisis kesesuaian antara prinsip dan kriteria ISPO dengan *Sustainable Development Goals* diketahui bahwa prinsip dan kriteria ISPO dapat berkontribusi pada 12 dari 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals*, yaitu: terkait kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, ketersediaan air dan sanitasi, energi, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan masyarakat, konsumsi yang berkelanjutan, perubahan iklim, terkait ekosistem daratan, dan terkait

perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. (Kemlu, 2019)

Dari 12 tujuan yang telah di sebutkan sebelumnya, maka tujuan tersebut dapat terganggu untuk pencapaian dalam menyukkseskan *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan apabila hambatan komoditas kelapa sawit dari negara-negara eksportir terhadap Indonesia tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu penulis merasa sangat penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan komoditas kelapa sawit demi tercapainya aspek-aspek *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

B. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan bahwa inti permasalahan penelitian, yaitu **“Bagaimana Strategi pemerintah Indonesia mengatasi Hambatan Komoditas kelapa sawit dalam menyukkseskan *Sustainable Development Goals* pada tahun 2018-2019?”**

C. Kerangka Pemikiran

Demi mempermudah mengenai penjelasan analisis dari permasalahan tersebut maka untuk membuat argument utama, penulis memerlukan kerangka berpikir, dalam hal ini penulis merasa diplomasi publik sangat tepat digunakan sebagai penjelasan analisis tersebut.

Diplomasi Publik

Diplomasi merupakan hal yang sangat penting dalam dunia internasional dan merupakan sebuah seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara terhadap negara lain melalui negosiasi dengan cara-cara damai atau bisa disebut dengan *soft power*. Dan apabila cara damai telah

dilakukan namun cara tersebut tidak berhasil untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan. Maka, diplomasi ancaman atau mengandalkan kekuatan yang dimiliki sebuah negara atau bisa disebut *hard power* dapat digunakan apabila cara damai tidak berhasil untuk mencapai keinginan dari sebuah negara. (Roy.s.l, 1995)

Sebagai salah satu instrument dari *soft power* diplomasi maka penulis akan menjelaskan pengertian mengenai diplomasi publik. Diplomasi publik merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara yang melibatkan pihak-pihak *non-state actors* seperti NGO, media masa, kelompok masyarakat, partai politik, parlemen, individu (wartawan, tokoh agama, artis), dan lain sebagainya terhadap publik internasional dengan tujuan untuk memberikan pengertian dasar suatu negara, seperti: prilaku negara, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan juga kebijakan suatu negara. Diplomasi publik dapat dilihat juga sebagai suatu usaha dalam meningkatkan mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat demi membentuk citra yang baik dari suatu negara. Dengan kata lain diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional seperti pemahaman mengenai ideologi, nilai dan budaya yang dapat mempengaruhi publik di dalam dunia internasional melalui pihak-pihak *non-state actors* seperti NGO, media masa, kelompok masyarakat, partai politik, parlemen, individu (wartawan, tokoh agama, artis), dan lain sebagainya. Dampak yang dihasilkan dari diplomasi publik mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial. Diplomasi publik juga dapat diartikan sebagai sebuah instrument politik yang digunakan oleh negara dengan melakukan hubungan dengan aktor non negara untuk memahami prilaku negara, budaya, mengatur hubungan, mempengaruhi opini dan sikap untuk meraih kepentingan yang diinginkan. (Gregory, 2008)

Dalam kamus besar Hubungan Internasional menyebutkan bahwa diplomasi publik merupakan usaha sebuah negara untuk mempengaruhi opini publik di negara lain dengan menggunakan beberapa instrumen seperti televisi, film, radio dan pertukaran budaya. (Becker, 1980) Nicholas J. Cull, merupakan Professor dalam Diplomasi Publik juga menjelaskan bahwa Diplomasi Publik merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor internasional untuk mengelola lingkungan internasional melalui interaksi dengan publik internasional. (Trisni, 2020)

John R Kelley menjelaskan bahwa dalam penerapan diplomasi publik terbagi dalam tiga bagian, yaitu: (1) *Information* merupakan cara melalui pengolahan maupun pengaturan dalam penyampaian informasi yang mampu dilakukan oleh negara dengan berfokuskan terhadap suatu kasus ataupun konflik yang sedang terjadi. (2) *Influence* merupakan cara yang dilakukan oleh negara dengan mempengaruhi sikap maupun pandangan publik di negara tujuan. (3) *Engagment* merupakan cara yang dilakukan oleh negara untuk peningkatan mengenai pemahaman dan kepercayaan publik di negara tujuan dalam menjalin hubungan kerjasama yang memiliki orientasi jangka waktu panjang. (Rasmussen, 2009)

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis merasa bahwa dari tiga bagian diplomasi publik yang dijelaskan oleh John R Kelley penulis menggunakan dua bagian yaitu *Information* dan *Engagment* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan komoditas kelapa sawit. Bagian *Information*, dikarenakan cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut menggunakan penyampaian informasi kepada publik internasional dalam membangun pemahaman bersama dan meluruskan kesalahpahaman

mengenai kebijakan yang dikeluarkan. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia di beberapa forum-forum internasional yaitu: *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*, *Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA)*, *United Nations Environment Assembly (UNEA)* dan juga dalam KTT ASEAN-Uni Eropa.

Dan bagian *Engagment*, dikarnakan cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut menggunakan peningkatan dan pembangunan kerjasama dalam waktu jangka Panjang terhadap beberapa negara seperti: Indonesia melakukan peningkatan kerjasama dengan India yang sebelumnya juga melakukan pembatasan terhadap penggunaan minyak sawit, kerjasama ini membahas mengenai kesepakatan antara dua negara yang menegaskan keberadaan *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *India National Palm Oil Sustainability Framework (IPOS)* sebagai kerangka berkelanjutan dalam produksi minyak sawit dan perdagangan antara Indonesia dan India. Kerjasama antara dua negara ini akan memiliki jangka waktu yang Panjang dan akan memberikan benefit yang menguntungkan bagi dua negara. Dan berfokus terhadap upaya kedua belah pihak dalam meningkatkan nilai perdagangan minyak sawit dari Indonesia ke India, termasuk juga kampanye menyuarakan peningkatan kesadaran warga India terhadap manfaat minyak kelapa sawit serta mengusulkan harmonisasi tarif ke pemerintah India. (Suwastoyo, 2018)

Indonesia juga melakukan peningkatan kerjasama CPO minyak sawit terhadap Tiongkok yang akan menerapkan program B5 atau biodiesel campuran 5% dengan solar sebagai komitmen dalam mengurangi emisi karbon. Pemakaian biodiesel di Tiongkok dapat menjadi pasar potensial demi meningkatkan ekspor produk sawit

Indonesia terutama biodiesel. Yang mana peningkatan CPO akan meningkat sebesar 9 juta ton. Kebijakan tersebut berdampak positif bagi industri minyak sawit di Indonesia setelah menghadapi berbagai tekanan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, dimana AS mengenakan pajak yang begitu besar akibat tuduhan adanya dumping dan subsidi produk biodiesel Indonesia. (Pers, 2017)

Selain dengan India dan Tiongkok Indonesia juga melakukan peningkatan kerjasama dengan Belanda. Pemerintah Indonesia dan Belanda telah menandatangani surat kesepakatan mengenai *Joint Production on Sustainable Palm Oil* atau Produksi Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan di sela-sela sidang majelis umum perserikatan bangsa-bangsa yang ke-74 di New York, Amerika Serikat. Pada penandatanganan tersebut Pemerintah Belanda diwakili oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Sigrid Kaag dan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menteri luar negeri Indonesia mengatakan surat kesepahaman mengenai Produksi Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan ditujukan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas petani sawit Indonesia dalam bidang pengetahuan maupun teknologi, khususnya dalam memenuhi sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan juga dapat mendorong produktivitas kelapa sawit berkelanjutan serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, diharapkan pula akan semakin meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Indonesia. (Hadyan, 2019)

Selain melakukan peningkatan kerjasama terhadap negara-negara mitra dagang minyak kelapa sawit dan turunannya seperti India, Tiongkok dan Belanda. Indonesia juga membangun pasar baru dalam perdagangan minyak kelapa sawit guna mengatasi hambatan komoditas

minyak kelapa sawit Indonesia akan berpotensi besar membangun pasar baru ke negara-negara nontradisional seperti Timur Tengah khususnya di negara-negara teluk seperti: Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Dan di Afrika seperti Mozambik, Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Dan juga terhadap negara Turki. (Yolanda, 2018)

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang serta didukung oleh kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan sebelumnya maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

1. Diplomasi publik *Information*, untuk membangun pemahaman bersama dan meluruskan kesalahpahaman pandangan masyarakat internasional terkait penyampaian yang dikeluarkan mengenai kelapa sawit, seperti melakukan diplomasi publik melalui forum-forum internasional untuk membangun pemahaman bersama. Cara tersebut merupakan Strategi pemerintah Indonesia mengatasi Hambatan Komoditas kelapa sawit dalam menyelesaikan Sustainable Development Goals.
2. Diplomasi publik *Engagment*, untuk peningkatan mengenai pemahaman dan kepercayaan publik di negara tujuan dalam menjalin hubungan kerjasama yang memiliki orientasi jangka waktu Panjang, seperti peningkatan kerjasama ke negara India, Tiongkok dan Belanda. Dan juga membangun pasar baru ke negara-negara nontradisional.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisa penyebab terjadinya hambatan

komoditas perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia.

- b. Menganalisa dampak yang akan terjadi jika hambatan komoditas perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia tidak diselesaikan dengan baik.
- c. Menganalisa strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan komoditas perdagangan kelapa sawit.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Yang mana dalam mengkaji maupun membahas tentang penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data kajian pustaka yang memiliki sumber berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, situs dari internet, serta sumber lainnya yang dikiranya relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dan untuk pengambilan atau jenis yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, karna semua data yang akan diambil nantinya berasal dari sumber yang sudah tertulis. Dan diakhir penelitian penulis akan memberikan data apa adanya secara deskriptif. (Afrizal, 2017)

G. Jangkauan Penelitian

Penulis menentukan Jangkauan penelitian dalam pembahasan ini agar nantinya pembahasan tidak menjadi melebar maupun salah. Sehingga akan tetap berfokus pada penelitian yang ingin diteliti. Dan juga agar menjadikan jawaban sesuai dengan apa yang ingin dibahas, maka penulis membatasi pembahasan sesuai dengan kurun waktu terjadinya hambatan komoditas minyak kelapa sawit Indonesia dari tahun 2018 hingga 2019.

H. Sistematika Penulisan

Agar nantinya tulisan skripsi ini menjadi sebuah karya tulis yang terstruktur dan juga teratur, maka penulis membagi pembahasan dalam beberapa bab yang mana bab-bab tersebut memiliki keterkaitan dalam pembahasan sehingga menjadikan satu kesatuan pembahasan yang lengkap.

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, kerangka Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian dan terakhir Sistematika Penulisan;

Bab II Penulis membahas mengenai Faktor penyebab hambatan komoditas minyak kelapa sawit Indonesia dan perkembangan Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) mengenai penerapan tata kelola dan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Bab III Penulis membahas mengenai Kontribusi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengenai tiga aspek utama yaitu: pengembangan masyarakat (*people*), pertumbuhan ekonomi (*profit*), dan juga perlindungan terhadap lingkungan (*planet*).

Bab IV Penulis membahas mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan komoditas perdagangan minyak kelapa sawit (CPO) dengan melakukan diplomasi publik *Information* dan *Engagment* melalui forum-forum internasional, dan melalui kerjasama Internasional seperti peningkatan Kerjasama ke negara-negara yang telah melakukan perdagangan sebelumnya, maupun membuka ekspansi pasar baru ke negara-negara nontradisional.

Bab V Merupakan penutup dan kesimpulan dari penelitian yang telah dibuat oleh penulis.